

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme dilandasi oleh intersubjektivitas antar FIU yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Hubungan intersubjektif antar anggota The Egmont Group itu sendiri kemudian dijelaskan sebagai hasil dari kesamaan kepentingan dalam penanganan pendanaan terorisme sebagai kejahatan lintas negara di mana ditentukan oleh identitas kolektif (*collective identity*) serta norma internasional. Hal ini kemudian membentuk kepentingan negara lain dalam hal ini Indonesia, melalui PPATK, untuk bergabung dalam The Egmont Group.

Identitas kolektif yang membentuk kepentingan Indonesia dalam penanganan pendanaan terorisme adalah sifat dari kejahatan tersebut sebagai kejahatan lintas negara dan sangat berdampak negatif pada berbagai aspek. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus terorisme yang terjadi pada kurun waktu awal 2000 hingga 2003, atau sebelum PPATK bergabung dalam The Egmont Group. Dalam berbagai kasus teror tersebut, dukungan berupa pendanaannya tidak dapat terlacak dan bersumber dari organisasi teror internasional yaitu Al Qaeda melalui berbagai metode pendanaan seperti kurir, transaksi antar bank, hingga penyalahgunaan organisasi non-profit.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai identitas kolektif berupa The Egmont Group sebagai wadah kerjasama antar FIU terkait kejahatan keuangan, termasuk pendanaan terorisme.

Sementara norma internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rekomendasi FATF. FATF sendiri merupakan *intergovernmental body* sekaligus *policy making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan, dan penegakan hukum di mana membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. The Egmont Group sendiri awalnya dibentuk untuk mendukung implementasi Rekomendasi FATF terkait dengan kejahatan pencucian uang. Kemudian pada tahun 2001, FATF menambahkan Rekomendasi terkait penanganan kejahatan pendanaan terorisme untuk menjadi pedoman seluruh negara di dunia, termasuk ke dalam fungsi FIU yang dimiliki masing-masing negara. Oleh karena itu, The Egmont Group sebagai wadah kerjasama antar FIU, juga turut mendukung Rekomendasi FATF terkait penanganan pendanaan terorisme. Intersubjektivitas yang terjadi dalam The Egmont Group, sebagai *transgovernmental organization*, terkait dengan penanganan pendanaan terorisme kemudian terlihat dari dukungan yang diberikan oleh organisasi tersebut diantaranya melalui *Egmont Plenary Meeting*, *Egmont Secure Web*, serta *ISIL Project*.

Terdapat faktor-faktor yang mendukung kerjasama PPATK dalam The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme di antaranya: sinergi yang kuat antar lembaga domestik terkait, fondasi undang-undang yang relevan, serta kesamaan urgensi seluruh negara dalam penanganan pendanaan terorisme. Sementara

terdapat pula faktor-faktor penghambat di antaranya: perbedaan regulasi negara anggota lainnya dan anggaran yang terbatas.

#### **4.2 Saran**

Secara keseluruhan, kerjasama yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam The Egmont Group terkait penanganan pendanaan terorisme sangatlah positif. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal, baik yang kompleks maupun mendasar, yang cukup menghambat kerjasama tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya kerjasama yang lebih komprehensif dan spesifik oleh Pemerintah Indonesia, terutama soal regulasi, dengan negara-negara dengan tingkat kerahasiaan data serta mekanisme pertukaran informasi yang ketat;
2. PPATK perlu memanfaatkan serta merealisasikan anggaran dari APBN dengan baik, terutama dalam kerjasama internasional yang strategis seperti The Egmont Group;
3. PPATK juga perlu melakukan perbaikan terkait dengan dokumentasi kerjasama dalam The Egmont Group, terutama terkait dengan penanganan pendanaan terorisme, agar dapat menjadi indikator antisipasi dalam penanganan pendanaan terorisme yang berpotensi terjadi di kemudian hari.

Penelitian ini sendiri masih memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan data konkret terkait dukungan-dukungan yang dimanfaatkan PPATK dari kerjasamanya dalam The Egmont Group terkait penanganan pendanaan terorisme. Untuk itu, penulis memberikan saran pada penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Menjelaskan lebih rinci mengenai implementasi konkret dari dukungan yang didapatkan PPATK dalam The Egmont Group terutama terkait penanganan pendanaan terorisme;
2. Menjelaskan efektivitas pemanfaatan dukungan The Egmont Group terhadap penanganan pendanaan terorisme di Indonesia.